

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN  
DAERAH KOTA BANDUNG  
(Studi Kasus Pada DPKAD Kota Bandung Periode 2009-2013)**

***THE EFFECT OF THE ORIGINAL REGIONAL INCOME FOR FINANCIAL INDEPENDENCE  
REGIONAL IN BANDUNG CITY  
(Study of DPKAD in Bandung area during 2009-2013 period)***

Nyoman Trisna Erawati<sup>1</sup>, Leny Suzan<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom

<sup>1</sup>[trisnaerawati@students.telkomuniversity.ac.id](mailto:trisnaerawati@students.telkomuniversity.ac.id), <sup>2</sup>[lenysuzan@telkomuniversity.ac.id](mailto:lenysuzan@telkomuniversity.ac.id)

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Bandung periode 2009-2013. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran selama 5 tahun yang di breakdown per bulan. Sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik sampling yaitu dengan menggunakan semua populasi.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda SPSS 20. Pendapatan asli daerah hanya berpengaruh sebesar 41,9% terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah sedangkan sebesar 58,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persamaan regresi menunjukkan  $Y = 14,073 + 1.561 \cdot 10^{-10} X_1 + 2.514 \cdot 10^{-10} X_2 + 1.815 \cdot 10^{-10} X_3 + 1.656 \cdot 10^{-10} X_4 + e$ .

Dari hasil uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Hasil uji parsial keempat komponen pendapatan asli daerah menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Sedangkan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Secara umum, tidak berpengaruhnya ketiga komponen pendapatan asli daerah dikarenakan pertumbuhan komponen pendapatan asli daerah tersebut berfluktuatif sedangkan tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Bandung cukup stabil.

**Kata Kunci:** pendapatan asli daerah, kemandirian keuangan daerah, pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah

**Abstract**

*This study aims to determine the effects of the original regional income on the level of local financial independence in Bandung area during 2009-2013 period. The population is budget realization report for 5 years which are breakdown per month. The sampling technique in this study is by using all of the population.*

*Data analysis technique used is multiple linear regression analysis SPSS 20. The original regional income only affects 41.9% of the level of local financial independence, while 58.1% are affected by other factors. The results shows that the regression equation  $Y = 14,073 + 1.561 \cdot 10^{-10} X_1 + 2.514 \cdot 10^{-10} X_2 + 1.815 \cdot 10^{-10} X_3 + 1.656 \cdot 10^{-10} X_4 + e$ .*

*From the results of hypothesis testing can be concluded that the original regional income simultaneously has significant effect on the level of local financial independence. Partial test results of four components of the original regional income showed that local tax has significant effect on the level of local financial independence. While regional retribution, separated local wealth management and other legitimate regional income do not affect the level of local financial independence. In general, these three components of the original regional income do not affect due to its fluctuative growth, whereas the level of financial independence in Bandung area is quite stable.*

**Keywords:** *the original regional income, financial independence regional, local tax, regional retribution, separated local wealth management, and other legitimate regional income*

**1. Pendahuluan**

Menurut UU No. 23 Tahun 2004, Otonomi Daerah mengandung arti bahwa daerah diberi kesempatan untuk mandiri dalam mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri dengan menggali dan memanfaatkan sumber-sumber ekonomi yang ada untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di daerah berdasarkan

prinsip-prinsip demokrasi, prinsip pemerataan dan keadilan, peran serta, prakarsa dan aspirasi masyarakat sendiri serta sesuai dengan kondisi, potensi dan keanekaragaman wilayahnya.

Penelitian yang dilakukan Salampeyy (2011) mengatakan bila suatu wilayah mampu dalam mengurus sendiri daerahnya dan sejalan dengan pendapatan asli daerah yang semakin tinggi, hal ini menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi daerah tersebut juga semakin tinggi. Menurut UU No 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. PAD bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Menurut Salampeyy (2011), diantara ketiga komponen sumber pendapatan, komponen transfer dari pusat merupakan cerminan atau indikator dari ketergantungan pendanaan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Di samping itu besarnya dana dari pusat tersebut juga membawa konsekuensi kepada kebijakan proyek pemerintah pusat yang secara fisik implementasinya berada di daerah.

Menurut Halim dan Kusufi (2014: lamp. 4), penggunaan analisis rasio sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan dimana rasio ini merupakan salah satu pengukuran yang menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta.

Tabel 1.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (*Otonomi Fiscal*) Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2009-2013

Tahun Anggaran	Realisasi PAD (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio Kemandirian (%)
2009	360,152,627,690.00	2,402,466,979,725.00	14.99
2010	441,863,068,294.00	2,440,160,360,714.00	18.11
2011	833,254,175,288.00	3,115,296,523,905.00	26.75
2012	1,005,583,424,429.00	3,666,693,409,600.00	27.42
2013	1,442,775,238,323.00	4,332,088,946,776.00	33.30
Rata-rata	<b>816,725,706,804.80</b>	<b>3,191,341,244,144.00</b>	<b>24.12</b>

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Bandung, 2014 (data diolah)

Dari perhitungan akhir rasio kemandirian keuangan daerah kota Bandung selama kurun waktu 5 tahun terakhir terhitung dari tahun 2009 hingga 2013, tingkat kemandirian daerah rata-rata keseluruhan 24,12% (rendah sekali 0-25%).

Dikarenakan rata-rata tingkat kemandirian keuangan daerah kota Bandung periode 2009-2013 tergolong rendah sekali dilihat dari rasio kemandirian dimana komponen pendapatan asli daerah dibandingkan dengan total pendapatan yang dapat dinyatakan bahwa tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat masih cukup tinggi dan menurut penelitian dari Ratnasari (2014) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Hal ini bertentangan dengan penelitian dari Putri, et all (2012) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh secara simultan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, maka penulis melakukan penelitian terhadap variabel pendapatan asli daerah yang komponennya terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah. Dari fenomena yang sudah dipaparkan di atas, maka penulis mengambil judul, **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kota Bandung (Studi Kasus Pada DPKAD Kota Bandung Periode 2009-2013)”**

### Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui bagaimana pendapatan asli daerah dan tingkat kemandirian Kota Bandung periode 2009-2013. 2) Untuk mengetahui pengaruh secara simultan pendapatan asli daerah tingkat kemandirian daerah Kota Bandung periode 2009-2013. 3) Untuk mengetahui pengaruh secara parsial dalam hal: a) Untuk menganalisis pengaruh pajak daerah terhadap tingkat kemandirian daerah Kota Bandung periode 2009-2013. b) Untuk mengetahui pengaruh retribusi daerah terhadap tingkat kemandirian daerah Kota Bandung periode 2009-2013. c) Untuk mengetahui pengaruh hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap tingkat kemandirian daerah Kota Bandung periode 2009-2013. d) Untuk mengetahui

pengaruh lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap tingkat kemandirian daerah Kota Bandung periode 2009-2013.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pendapatan asli daerah dan tingkat kemandirian daerah pada kota Bandung periode 2009-2013?. 2) Bagaimana pengaruh secara simultan dari pendapatan asli daerah terhadap tingkat kemandirian daerah kota Bandung periode 2009-2013?. 3) Bagaimana pengaruh secara parsial dari: a) Bagaimana pengaruh secara parsial dari pajak daerah terhadap tingkat kemandirian daerah Kota Bandung periode 2009-2013?. b) Bagaimana pengaruh secara parsial dari retribusi daerah terhadap tingkat kemandirian daerah Kota Bandung periode 2009-2013?. c) Bagaimana pengaruh secara parsial dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap tingkat kemandirian daerah Kota Bandung periode 2009-2013?. d) Bagaimana pengaruh secara parsial dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap tingkat kemandirian daerah Kota Bandung periode 2009-2013?.

## **2. Dasar Teori/Material dan Metodologi/Perancangan**

### **2.1 Dasar Teori**

#### **2.1.1 Teori Keagenan**

Menurut Halim dan Syukriy (2010), teori keagenan adalah teori yang menjelaskan hubungan prinsipal dan agen ini salah satunya berakar pada teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Teori prinsipal-agen menganalisis susunan kontraktual di antara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Salah satu pihak (*principal*) membuat suatu kontrak dengan pihak lain (*agent*) dengan harapan bahwa agen akan bertindak/melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh prinsipal (dalam hal ini terjadi pendelegasian wewenang).

#### **2.1.2 Akuntansi Pemerintahan**

Menurut Rahmat (2010:18), akuntansi pemerintahan adalah suatu kegiatan jasa yang berfungsi menyajikan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, dari suatu lembaga atau komersial, yang diharapkan dapat digunakan sebagai dasar mengambil keputusan ekonomi di antara berbagai alternatif arah tindakan.

#### **2.1.3 Pengertian Otonomi Daerah**

Menurut UU No.23 Tahun 2014, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### **2.1.4 Pengelolaan Keuangan Daerah**

Menurut Halim dan Kusufi (2014), pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Darise (2009:37) menyatakan bahwa asas umum pengelolaan keuangan daerah sebagaimana pada Pasal 66 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan pengelolaan keuangan daerah dikelola dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.

#### **2.1.5 Anggaran Pendapatan Belanja dan Modal (APBD)**

Menurut Halim dan Kusufi (2014), APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

#### **2.1.6 Penerimaan Daerah**

Menurut Darise (2009:42), penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan dan pembiayaan. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan Daerah menurut Halim dan Kusufi (2014:100) bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Dana Perimbangan; dan
- c. Lain-lain Pendapatan

### 2.1.7 Pendapatan Asli Daerah

Menurut Halim dan Kusufi (2014:101), Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu sebagai berikut:

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

### 2.1.8 Rasio Kemandirian Daerah

Halim dan Kusufi (2014: lamp. 5) menyatakan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah atau yang sering disebut sebagai otonomi fiskal menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan total pendapatan. Rasio ini juga menggambarkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi”

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\% \quad (1)$$

## 2.2 Metodologi Penelitian

Populasi penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Kota Bandung yang terdaftar di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada periode 2009-2013. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian dilakukan secara *time-series*. Data *time series* adalah data satu objek yang meliputi beberapa periode waktu.

Teknik *sampling* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sampling* jenuh. Jadi sampel dalam penelitian ini adalah seluruh anggota populasi yakni Laporan Realisasi Anggaran Kota Bandung yang terdaftar di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada periode 2009-2013. Jumlah sampel dalam penelitian ini ialah sebanyak 60 sampel yang berasal dari 5 tahun LRA yang di breakdown per bulan menjadi 12 bulan per tahun. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi linier berganda yang persamaannya dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

- Y = Tingkat Kemandirian Keuangan  
 a = Konstanta  
 $\beta_1$ - $\beta_4$  = Koefisien regresi dari setiap variabel independen  
 $X_1$  = Pajak Daerah  
 $X_2$  = Retribusi Daerah  
 $X_3$  = Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan  
 $X_4$  = Lain-lain PAD yang Sah  
 e = Error

## 3. Pembahasan

Penelitian ini menggunakan tingkat kemandirian keuangan daerah sebagai variabel dependen, sedangkan variabel independen yang digunakan adalah pendapatan asli daerah yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dari hasil pengujian statistik deskriptif bisa didapatkan bahwa dalam lima tahun, yaitu 2009-2013 baik pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Bandung berfluktuatif dari tahun ke tahun.

### a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal [4]. Untuk mendeteksi normalitas data dapat dilakukan dengan uji kolmogorov-smirnov test (K-S). Berdasarkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa nilai K-S sebesar 0,846

dan nilai probabilitas yang diperoleh sebesar  $\text{Sig.} = 0,471 > 0,05$  maka  $H_0$  diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian berasal dari populasi yang berdistribusi normal.

#### b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik harusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen [4]. Berdasarkan hasil uji multikolinearitas dapat diketahui bahwa *tolerance value* semua variabel independen berada di atas 0,10 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIP) dibawah 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas dalam persamaan regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini.

#### c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas [4].

Berdasarkan Hasil Uji Heteroskedastisitas pada model dengan uji Glejser menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara variabel bebas dengan hasil mutlak residual sehingga menunjukkan tidak adanya masalah heteroskedastisitas dalam model regresi. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi tidak berada di bawah 0,05 atau diatas 5%.

#### d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengguna pada periode  $t$  dengan kesalahan periode  $t-1$  (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada *problem* autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya [4].

Berdasarkan hasil uji autokorelasi dijelaskan bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 2,116, nilai ini akan dibandingkan dengan menggunakan nilai signifikansi 5%, jumlah sampel 60 ( $n$ ) dan jumlah variabel independen 4 ( $k=4$ ). Dengan menggunakan tabel Durbin-Watson akan didapat nilai batas bawah ( $dl$ ) sebesar 1,444 dan batas atas ( $du$ ) sebesar 1,727. Karena nilai Durbin-Watson lebih besar dari batas atas ( $du$ ) dan kurang dari  $4-1,727$  ( $4-du$ ), maka tidak terdapat autokorelasi.

#### e. Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Hasil pengujian dari pendapatan asli daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah disajikan secara simultan pada tabel 1 sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Hasil Uji F**  
**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2557.994	4	639.498	11.656	.000 <sup>b</sup>
	Residual	3017.444	55	54.863		
	Total	5575.438	59			

a. Dependent Variable: Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

b. Predictors: (Constant), Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, Pajak Daerah

Sumber : Data sekunder yang diolah dengan SPSS 20 (2015)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel dependen [4].

Dengan pengambilan keputusan sebagai berikut:

a. Jika nilai Sig. lebih besar dari atau sama dengan nilai probabilitas ( $\text{Sig.} \geq 0,05$ ) artinya tidak berpengaruh signifikan.

b. Jika nilai Sig. lebih kecil dari atau sama dengan nilai probabilitas ( $\text{Sig.} \leq 0,05$ ) artinya berpengaruh signifikan.

Berdasarkan tabel 1, nilai probabilitas =  $0,000 < \alpha = 5\%$  maka variabel pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan secara simultan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Hasil uji ini sesuai dengan teori bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah. Semakin tinggi pendapatan asli daerah, maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian keuangan daerahnya.

#### f. Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji T)

Hasil pengujian dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah secara parsial disajikan pada tabel 2 sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Hasil Uji T**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	14.073	2.864		4.914	.000
X <sub>1</sub>	1.561 <sup>-10</sup>	.000	.580	4.115	.000
X <sub>2</sub>	2.514 <sup>-10</sup>	.000	.066	.607	.546
X <sub>3</sub>	1.815 <sup>-10</sup>	.000	.042	.423	.674
X <sub>4</sub>	1.656 <sup>-10</sup>	.000	.097	.737	.464

a. Dependent Variable: Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Sumber : Data sekunder yang diolah dengan SPSS 20 (2015)

Berdasarkan tabel 2, dapat disimpulkan sebagai berikut :

### 3.1. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bandung

Berdasarkan hasil pengujian pada uji statistik t diketahui bahwa variabel pajak daerah menunjukkan taraf signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dibandingkan taraf signifikansi sebesar 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pajak daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Dengan demikian H<sub>1</sub> yang menyatakan pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah diterima. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak yang merupakan komponen PAD. Semakin tinggi masyarakat dalam membayar pajak daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi

Dengan demikian secara statistik, pajak daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Ratnasari (2014) dan Yani (2013) menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

### 3.2. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bandung

Berdasarkan hasil pengujian pada uji statistik t diketahui bahwa variabel retribusi daerah memiliki taraf signifikansi sebesar 0,546 yang lebih besar dibandingkan taraf signifikansi sebesar 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel retribusi daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Dengan demikian H<sub>2</sub> yang menyatakan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah ditolak. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar retribusi daerah yang merupakan komponen PAD. Semakin tinggi masyarakat dalam membayar retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi.

Dengan demikian secara statistik, retribusi daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Hal ini dikarenakan kontribusi atau pemungutan dari retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah yang merupakan komponen dalam mengetahui tingkat kemandirian keuangan daerah masih kurang dan terdapat komponen lain yang memberikan kontribusi lebih banyak dalam mempengaruhi pendapatan asli daerah. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Putri, et all (2012) menyatakan bahwa retribusi daerah tidak memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

### 3.3. Pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bandung

Berdasarkan hasil pengujian pada uji statistik t diketahui bahwa variabel hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menunjukkan taraf signifikansi sebesar 0,314 yang lebih besar dibandingkan taraf signifikansi sebesar 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Dengan demikian H<sub>3</sub>

yang menyatakan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah ditolak. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa semakin tingginya hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan maka PAD juga akan meningkat sehingga dapat meningkatkan tingkat kemandirian keuangan daerah.

Dengan demikian secara statistik, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Hal ini dikarenakan kontribusi dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap pendapatan asli daerah yang merupakan komponen dalam mengetahui tingkat kemandirian keuangan daerah masih kurang dan terdapat komponen lain yang memberikan kontribusi lebih banyak dalam mempengaruhi pendapatan asli daerah dan hanya di bulan-bulan tertentu saja yang memperoleh hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Putri, et all (2012) menyatakan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

### 3.4. Pengaruh Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bandung

Berdasarkan hasil pengujian pada uji statistik t diketahui bahwa variabel lain-lain pendapatan asli daerah yang sah menunjukkan taraf signifikansi sebesar 0,464 yang lebih besar dibandingkan tingkat signifikansi sebesar 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Dengan demikian  $H_4$  yang menyatakan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah ditolak. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa semakin tingginya lain-lain pendapatan asli daerah yang sah maka PAD juga akan meningkat sehingga dapat meningkatkan tingkat kemandirian keuangan daerah.

Dengan demikian secara statistik, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Hal ini dikarenakan kontribusi dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap pendapatan asli daerah yang merupakan komponen dalam mengetahui tingkat kemandirian keuangan daerah masih kurang dan terdapat komponen lain yang memberikan kontribusi lebih banyak dalam mempengaruhi pendapatan asli daerah. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Putri, et all (2012) menyatakan bahwa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tidak memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

#### g. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Hasil perhitungan *adjusted* koefisien determinasi (*adjusted*  $R^2$ ) disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.677 <sup>a</sup>	.459	.419	7.40693

a. Predictors: (Constant), LLPADYS, HPKDYD, RD, PD

Sumber : Data sekunder yang diolah dengan SPSS 20 (2015)

Berdasarkan tabel 3, besarnya nilai *adjusted*  $R^2$  sebesar 0.419 yang berarti variabilitas variabel tingkat kemandirian keuangan daerah yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel pendapatan asli daerah sebesar 41.9%. Sedangkan sisanya sebesar 58.1% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

## 4. Kesimpulan

Dengan menggunakan statistika deskriptif, dapat terlihat bahwa: 1) Pajak daerah terdapat peningkatan dari tahun 2009 hingga 2010 sebesar 20,55%. Pada tahun 2011 meningkat sebesar 121.06%, pada tahun 2012 meningkat sebesar 23%, dan pada tahun 2013 meningkat sebesar 45,52% dari tahun sebelumnya. 2) Retribusi daerah terdapat peningkatan dari tahun 2009 hingga 2010 sebesar 25,48%. Pada tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 17,10%, pada tahun 2012 meningkat sebesar 9,72%, dan di tahun 2013 meningkat sebesar 46,86% dari tahun sebelumnya. 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, terdapat peningkatan dari tahun 2009 hingga 2010 sebesar 114,37%. Pada tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 32,49%, di tahun 2012 juga mengalami penurunan sebesar 30,03%, dan di tahun 2013 meningkat sebesar 67,01% dari tahun sebelumnya. 4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, terdapat peningkatan dari tahun 2009 hingga 2010 sebesar 13,47%. Pada tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 119,61%, di tahun 2012 meningkat sebesar 17,84%, dan di tahun 2013 meningkat sebesar 22,16% dari tahun sebelumnya. 5) Tingkat kemandirian keuangan daerah pada tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 20,79%, pada tahun 2011 mengalami peningkatan

sebesar 47,71%, pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 2,53%, dan pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 21,44% dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan variabel pendapatan asli daerah yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Bandung periode 2009-2013. Hal ini dibuktikan berdasarkan uji *F test* taraf signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dibandingkan  $\alpha = 5\%$ . Kemampuan variabel independen dalam menerangkan variabel tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar 41,9% sedangkan sebesar 58,1% dijelaskan oleh sebab lain di luar penelitian ini.

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial variabel pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah mempunyai pengaruh berikut ini: 1) Pajak daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. 2) Retribusi daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. 4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

#### Daftar Pustaka:

- [1] Darise, Nurlan. (2009). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Kedua. Jakarta: PT. Indeks.
- [2] Halim, Abdul dan Kusufi. (2014). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat.
- [3] Halim, Abdul dan Syukriy Abdullah. (2010). *Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah*. Jakarta: LPKPAP-BPPK.
- [4] Ghozali, Prof. Dr. H. Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang: Undip
- [5] Rahmat, Dr. M.Si. (2010). *Akuntansi Pemerintahan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- [6] Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta: Sinar Grafika.
- [7] Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Jakarta: Sinar Grafika.
- [8] Salampessy, Zulkarim. (2011). *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah*, Jurnal Ekonomi dan Manajemen, Vol 2 No 1, Oktober, hal 19-29, Universitas Pattimura, Ambon.
- [9] Syahrial dan Sutoyo (2014). *Peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Lhokseumawe*. Jurnal Kebangsaan, Vol.3 No. 5, Hal 20-28, ISSN: 2089-5917. Politeknik Negeri Lhokseumawe.
- [10] Putri, Dwi, et all. (2012). *Pengaruh Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Kabupaten dan Kota se-Provinsi Bengkulu (Studi Kasus 2004-2010)*. Thesis. Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu. Bengkulu.
- [11] Ratnasari, Dian. (2014). *Pengaruh Komponen Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2010-2012*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Gunadharma. Jakarta.
- [12] Yani dan Ulpah (2013). *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara*. Skripsi. Universitas Negeri Medan. Medan.